



**IMPLEMENTASI PROGRAM INFRASTRUKTUR PERDESAAN
PIIP DALAM MENUNJANG KINERJA KEPALA DESA DI DESA
TEBING ABANG KECAMATAN RANTAU BAYUR
KABUPATEN BANYUASIN)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : NOVITASARI

NIM : 20.11.217

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Novita Sari 2024, "Implementation of the Rural Infrastructure Program (PIIP) in Supporting the Performance of Village Heads in Tebing Abang Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency". Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor (I) Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.SI and Assistant Supervisor (II) Yofitri Heny Wahyuli, S.Sos., M.Si

Implementation of the Rural Infrastructure Program (PIIP) aims to improve the quality of infrastructure in villages, including Tebing Abang Village in Rantau Bayur District, Banyuasin Regency. This research aims to evaluate the effectiveness of PIIP in supporting the performance of village heads in Tebing Abang Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, involving in-depth interviews with various related parties, including the village head, village officials and the local community. Budget limitations, lack of technical capacity at the village level, and bureaucratic obstacles. Therefore, it is recommended that local governments provide technical and managerial training to village heads and village officials, as well as improve coordination between related agencies to facilitate the implementation of this program. In this way, PIIP can be more optimal in supporting village development and improving the welfare of the community in Tebing Abang Village.

The research results show that PIIP has made a significant contribution to improving the performance of village heads, especially in the aspects of planning and implementing infrastructure development. This program enables village heads to more effectively identify and meet village infrastructure needs, allocate resources more efficiently, and increase community participation in the development process. Apart from that, PIIP also encourages transparency and accountability in the management of village funds, which in turn increases public trust in the leadership of the village head.

Keywords: *Rural Infrastructure Program, Village Head Performance,*

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan Desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan

pemerintahan Desa yang lebih baik. Bagian salah satu aspek penting dalam pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dan pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua

stakeholder, untuk meningkatkan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan Desa ini, sebagai sebagian pembangunan Nasional dan Daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi ditingkat Desa, Kepala Desa sangat berperan dalam pembangunan bersama sama dengan Badan Perwakilan desa, yang merupakan pemimpin dari organisasi formal dan BPD dari organisasi Informal yaitu elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat di Desa.

Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di Desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di Desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun melaksanakan pembangunan di Desa. Selain itu, pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik itu BPD, Pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintahan Desa perlu memiliki pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, dalam kesatuan pemerintah tentang Desa bahwa pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, banyaknya masyarakat yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan membuktikan masyarakat tidak mampu

menciptakan kesejahteraannya sendiri yang berarti juga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya tidak merata atau tidak terlalu berpengaruh, sehingga kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Kemiskinan kerap dihubungkan dengan pembangunan yang diupayakan oleh Pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Masyarakat diseluruh dunia mendambakan pembangunan yang adil dan merata. Oleh sebab itu setiap negara selalu berupaya untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan infrastruktur. Upaya mencapai kesejahteraan, berarti haruslah hasil pembangunan seperti pembangunan infrastruktur pedesaan atau pembangunan dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia dapat merata diterima seluruh pelosok tanah air, khususnya dapat menjangkau ke lapisan paling bawah. Terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Pada UU No 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang secara utama menjadi kewajiban dan beban pemerintah, namun dalam prosesnya memungkinkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan program PPIP di Tebing Abang, belumlah dikatakan sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan data awal yang didapatkan penulis adalah:

1. Pembangunan yang dilakukan di Desa Tebing Abang belum sepenuhnya mencerminkan keinginan masyarakat desa. Sebab pembangunan dilakukan tanpa melalui musyawarah desa.
2. pembangunan yang dilakukan berulang pada insfastruktur yang sama. Sehingga fasilitas penunjang yang lain terabaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- B. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?
- C. Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan

terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Wahab (2023:51), “Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya”. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

B. Model Implementasi dari George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2000: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2015:85) kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu : (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan kedalam program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung didalamnya : siapa pelaksanaannya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur.

Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. George C. Edward III dalam Subarsono (2015:102)

mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

C. Pelaksanaan Program Infrastruktur Pedesaan

Menurut Buku Pedoman Program Infrastruktur Pedesaan (2019:9-11) merupakan program yang ditujukan untuk memberikan peluang dalam mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan factor penting dalam pengembangan Desa.

Adapun tujuan dari Program Infrastruktur Pedesaan adalah:

- Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur pedesaan.
-

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Infrastruktur Pedesaan adalah:

- Tersedianya infrastruktur desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
- Meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan
- Meningkatnya penanganan desa tertinggal
- Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah
- Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan pedesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan PPIP adalah:

- Pemilihan kegiatan dilakukasn berdasarkan musyawarah desa
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama masyarakat dengan prinsip keterbukaan Adanya pertanggung jawaban
- Penyelenggaran kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun pendekatan dalam PPIP adalah:

- Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengontrol kehidupan mereka, berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ini melibatkan upaya untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk membuat perubahan positif..

- Keberpihakan kepada yang miskin
- Partisipatif
- Keswadayaan
- Keterpaduan program pembangunan
- Penguatan kapasitas kelembagaan

D. Pengertian Kinerja

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan orang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2015:165).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, target atau sasaran atau kriteria yang terlebih dahulu telah disepakatibersama (Rivai dan Basri, 2015:50)

Menurut Prawirosentono dalam Rivai dan Basri (2015:176) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

- Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila

akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remehmaka kegiatan tersebut efisien.

2. Otoritas (wewenang)

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

3. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

4. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manager dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja.

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2016:260) Sbb.

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

2. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketetapan waktu

Merupakan tingkatan aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Merupakan tingkatan pengguna sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap unit dalam pengguna sumber daya.

5. Kemandirian

Merupakan suatu tingkatan dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

D. Kinerja Kepala Desa

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Perlu dilakukan penilaian kinerja kepala Desa yang dilakukan oleh BPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 49 dijelaskan bahwa:

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- Pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan
- Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

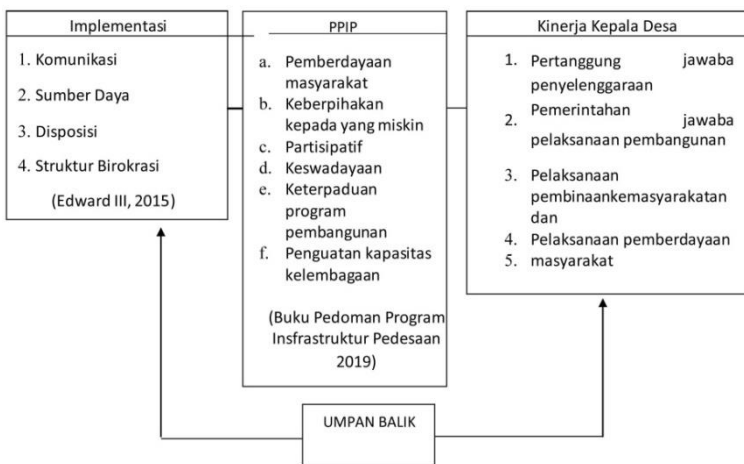
3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Kemudian pada Pasal 51 dijelaskan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III dan Teori Kinerja Kepala Desa yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 49. Kerangka berpikir dari penelitian ini secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Sugiyono (2021:7) adalah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif dalam Sugiyono (2021:9) adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

**BAB V
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN**

A. Implementasi

Perilaku birokrasi dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan dalam memberikan pelayanan.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana harus benar-benar disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga kesinkronan antara peraturan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai komunikasi mengenai Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin penyampaian informasi telah terlaksana dengan cukup baik, dimana sekretaris desa telah mengkomunikasikan kepada pihak pegawai dan masyarakat dengan mengadakan forum musyawarah sehingga

masyarakat dapat ikut bergabung memahami dan mengerti bahwa adanya infrastruktur perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi apabila Implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya tersebut dapat terwujud Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. bahwa ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program infrastruktur perdesaan di Desa Tebing Abang, seperti proses pendanaan yang rumit dari pemerintah pusat, hambatan birokrasi, dan pentingnya transparansi serta keterlibatan pemuda. Upaya perbaikan dalam prosedur birokrasi, konsistensi alokasi dana, dan peningkatan akses informasi diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini untuk mencapai keberhasilan proyek infrastruktur perdesaan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila sikap para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin menjadi sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai disposisi menunjukkan bahwa sikap petugas dalam pelaksanaan program infrastruktur

perdesaan di Desa Tebing Abang sangat baik dan mendukung. Kerjasama, keterbukaan, dukungan, rasa hormat, profesionalisme, dedikasi, sikap kooperatif, dan kemampuan menghadapi tantangan dengan sikap positif adalah faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada kelancaran dan keberhasilan program infrastruktur di desa ini.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai struktur birokrasi bahwa meskipun ada struktur dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Desa Tebing Abang, terdapat beberapa tantangan signifikan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterlambatan pencairan dana, dan proses birokrasi yang rumit. Keterlibatan aktif masyarakat dan perbaikan dalam proses administrasi diperlukan untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

B. Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Menurut Buku Pedoman Program Infrastruktur Pedesaan (2019:9-11) merupakan program yang ditujukan untuk memberikan peluang dalam mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan factor penting dalam pengembangan Desa yaitu, sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengontrol kehidupan mereka, berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ini melibatkan upaya untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan, serta membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk membuat perubahan positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan pengawasan program pemberdayaan adalah kunci keberhasilan. Tantangan seperti perubahan pola pikir warga dan kendala infrastruktur perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dampak positif dari program-program ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

2. Keberpihakan Kepada Yang Miskin

Keberpihakan kepada yang miskin merupakan upaya dan kebijakan yang secara khusus dirancang untuk mendukung dan memberdayakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Ini melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan memperbaiki kualitas hidup orang-orang miskin. Berikut adalah beberapa aspek utama keberpihakan kepada yang miskin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin disimpulkan bahwa Pembangunan di Desa Tebing Abang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberpihakan kepada masyarakat miskin. Pemerintah desa memprioritaskan aspek pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Proyek pembangunan diserahkan kepada masyarakat untuk dikerjakan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

4. Partisipatif

Partisipatif adalah konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan atau proyek yang berdampak pada mereka. Pendekatan partisipatif menekankan pentingnya masukan, kolaborasi, dan peran aktif dari semua anggota masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis partisipatif Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam partisipasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin disimpulkan bahwa Pihak pemerintah desa menganggap partisipasi sudah baik, dengan upaya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

5. Keswadayaan

Keswadayaan adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mendorong dan mendukung inisiatif keswadayaan, komunitas dapat menjadi lebih mandiri dan resilien dalam menghadapi tantangan global.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis keswadayaan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam prinsip keswadayaan dalam pembangunan di Desa Tebing Abang sudah diterapkan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada inisiatif dan partisipasi dari masyarakat, konsistensi dan keterlibatan seluruh warga belum optimal. Tantangan utama termasuk kurangnya perhatian terhadap usulan masyarakat dalam musyawarah desa, serta ketidakmerataan partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Upaya peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keswadayaan dapat berjalan dengan baik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

6. Keterpaduan Program Pembangunan

Keterpaduan program pembangunan merujuk pada pendekatan holistik dan terkoordinasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan

mengevaluasi program pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan komunitas lokal bekerja secara sinergis dan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Keterpaduan program pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin bahwa pihak pemerintah desa untuk memastikan keterpaduan dalam pembangunan di Desa Tebing Abang, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Masyarakat merasa bahwa pembangunan belum sepenuhnya terpadu, dengan beberapa proyek tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan hasil yang kurang optimal. Perlu ada peningkatan dalam koordinasi dan integrasi antarproyek untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan saling mendukung dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.

7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi atau institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan prosedur kerja, hingga peningkatan kapasitas teknis dan manajerial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Penguatan Kapasitas Kelembagaan pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di Desa Tebing Abang melalui sistem yang lebih transparan,

akuntabel, dan partisipatif. Meski ada kemajuan, seperti peningkatan frekuensi musyawarah desa dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi pemahaman tugas dan tanggung jawab yang belum merata di antara perangkat desa serta kurangnya koordinasi antar perangkat. Untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan, perlu terus dilakukan pelatihan, pengawasan, serta upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar perangkat desa

C Kinerja Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis akan membahas Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 49, yaitu sebagai berikut

1. Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tebing Abang

Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengkoordinir segala aktivitas pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Dalam Pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tebing abang dapat disimpulkan bahwa terlihat ada ruang untuk perbaikan dalam memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Tebing Abang, sehingga dapat memperkuat legitimasi dan kinerja pemerintah desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tebing Abang

Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan di desa tebing abang kecamatan kecamatan Rantau bayu

kabupaten banyuasin memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta memberikan mekanisme bagi otoritas yang lebih tinggi untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan dan hasil dari pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Dalam Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin bahwa meskipun ada komitmen dari pihak pemerintah desa untuk memastikan keterpaduan dalam pembangunan di Desa Tebing Abang, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Masyarakat merasa bahwa pembangunan belum sepenuhnya terpadu, dengan beberapa proyek tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan hasil yang kurang optimal.

3. Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di desa tebing abang kecamatan kecamatan Rantau bayu kabupaten banyuasin harus aktif dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemasyarakatan di desa, serta melaporkan kemajuan dan hasil dari kegiatan tersebut secara rutin kepada otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan adanya pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Dalam Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Desa Tebing Abang menunjukkan upaya yang signifikan dari pemerintah desa untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Program pelatihan dan penyuluhan telah diadakan, mencakup berbagai aspek seperti keterampilan, kesehatan, dan lingkungan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana individu atau kelompok dalam Pemberdayaan

Masyarakat menunjukkan kemajuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam peningkatan keterampilan dan pendapatan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi program, dukungan berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi aktif dari warga desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan bahwa Program pemberdayaan masyarakat di Desa Tebing Abang sudah menunjukkan kemajuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam peningkatan keterampilan dan pendapatan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi program, dukungan berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi aktif dari warga desa.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Faktor Pendukung implementasi infrusktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai desa dan masyarakat dalam implementasi infrusktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang menjadi faktor pendukung yaitu Penyampaian Informasi yang Baik Sekretaris desa berhasil mengomunikasikan program kepada pegawai dan masyarakat melalui forum musyawarah, sehingga masyarakat memahami dan mendukung program PIIP. Informasi disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan kebijakan, memastikan keselarasan antara peraturan

dan implementasi, Pemerintah desa berupaya untuk memastikan keterpaduan dalam pembangunan, meskipun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dan integrasi antar proyek dan kinerja kepala desa dalam rogram pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat nyata untuk warga, yang mendukung keberhasilan keseluruhan program walaupun belum maksimal

Selanjutnya faktor penghambat dalam implementasi infrstruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin akan penulis deskripsikan sebagai berikut.yang menjadi penghambat dalam proses implementasi tersebut adalah sumber daya uang dari pemerintah pusat, proses birokrasi yang kompleks dan lambat dapat menghambat pelaksanaan proyek, menyebabkan keterlambatan dan efisiensi yang rendah dan kurang partisipasi masyarakat yang masih tidak memperdulihkan tentang infrastruktur yang dibangun di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin pelaksanaan dari indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, dengan partisipasi masyarakat bahwa sangat pentingnya infrastruktur Perdesaan bagi masyarakat di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi infrstruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang

Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

- a. Penyampaian Informasi yang Baik Sekretaris desa berhasil mengomunikasikan program kepada pegawai dan masyarakat melalui forum musyawarah, sehingga masyarakat memahami dan mendukung program PPIP. Informasi disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan kebijakan, memastikan keselarasan antara peraturan dan implementasi, Pemerintah desa berupaya untuk memastikan keterpaduan dalam pembangunan, meskipun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dan integrasi antar proyek dan kinerja kepala desa dalam rogram pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat nyata untuk warga, yang mendukung keberhasilan keseluruhan program walaupun belum maksimal.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yaitu akses jalan yang buruk, bisa menghambat pengiriman material dan peralatan, serta menghambat mobilitas tenaga kerja

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut.

1. Dalam pendanaan dalam Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tidak harus bergantung kepada Pemerintahan Pusat, pemerintahan desa harus bisa mandiri dengan cara membuat program khusus pendanaan yang digunakan untuk kepentingan program insfrastruktur

2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa Di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, antara lain: memanfaatkan material lokal yang tersedia di desa. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada pengiriman material dari luar yang memerlukan akses jalan yang baik. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Muhammad Irfan. 2018. Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka
- Luthans, 2015. Perilaku Organisasi, Alih Bahasa V. A Yuwono. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugroho, Riant. 2021. Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurlaila, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ternate: Penerbit LepKhair Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Rivai, dan Basri. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Robbins, P. Stephen. 2016. Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Jakarta: Erlangga
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2015. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S Subarsono.
- AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono, 2021. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supardi, dkk. 2023. Pedoman penyusunan skripsi. Palembang: STIA Satya Negara
- Taliziduhu, Ndraha. 2013. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid III. Yogyakarta: PT. Rineke Press
- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul. 2023. Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: CAPS
- Misrotin, Yani. Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. (<https://onsearch.id/Record/IOS4666.131049/TOC>) (online)(diakses 15 Desember 2023)
- Fauzyah Rahmah, Ari Subowo. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. (<https://www.neliti.com/id/publications/183147/implementasi-program-pembangunan-infrastruktur-perdesaan-ppip-di-desa-wiru-kecam>)(online)(diakses 15 Desember 2023)